



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)**

SKRIPSI

Oleh:

Rika Novita Sari

110810301020

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Rika Novita Sari

110810301020

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terimakasihku kepada :

1. Ibunda Kasiyem dan Ayahanda Moch. Salim terkasih. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, dukungan, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah dalam keberhasilanku.
2. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Seluruh keluarga besar dan sahabat tercinta yang juga memberikan dukungan, perhatian, dan doanya.
4. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh kesabaran.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri.

(QS. Ar Ra'ad: 11)

Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan anda.

(Andrew Carnegie)

Dream, believe, and make it happen....

(Agnez Mo)

If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl. But whatever you do you have to keep moving forward.

(Martin Luther King Jr.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Novita Sari

NIM : 110810301020

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan.

Rika Novita Sari
NIM 110810301020

SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)**

Oleh:

Rika Novita Sari
110810301020

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sudarno M.Si, Ak

Dosen Pembimbing II : Novi Wulandari W. SE., M.Acc & Fin.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIKA NOVITA SARI
NIM : 110810301020
JURUSAN : S1 AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)
TANGGAL PERSETUJUAN : 14 JANUARI 2015

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sudarno M.Si, Ak
NIP. 19601225 198902 1 001

Novi Wulandari W. SE., M.Acc & Fin.
NIP. 19801127 200501 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak
NIP. 19720416 2001121 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul :

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rika Novita Sari

NIM : 110810301020

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Kartika S.E., M.Sc., Ak. (.....)
NIP. 198202072008122002

Sekretaris : Nining Ika Wahyuni S.E., M.Sc., Ak. (.....)
NIP. 198306242006041001

Anggota : Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196701021992032002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si
NIP 19630614 199002 1 001

Rika Novita Sari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam sektor perbankan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan CFROA (*Cash Flow Return On Assets*), sedangkan indikator *good corporate governance* dalam penelitian ini ditentukan oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam periode 2012-2013. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan SPSS, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; Komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; sedangkan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: *Good corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi.

Rika Novita Sari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of corporate governance on financial performance in the banking sector. Financial performance in this research was measured by using CFROA (Cash Flow Return On Assets), while the indicator of good corporate governance in this research are determined by variable managerial ownership, institutional ownership, independent board, audit committee and board of directors. The population in this research are all banking companies listed on the Stock Exchange (the Indonesia Stock Exchange) in the period 2012-2013. Sampling using purposive sampling and sample in this research amounted to 22 banks. The method used in this research is the method of documentation. Data analysis techniques used in this research is quantitative descriptive analysis using SPSS, classic assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of this research indicate that managerial ownership, institutional ownership, and independent board significant negative effect on the financial performance; The audit committee is not a significant positive effect on financial performance; while the board of directors significant positive effect on financial performance.

Key words: Good corporate governance, managerial ownership, institutional ownership, independent board, audit committee, the board of directors.

RINGKASAN

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia); Rika Novita Sari; 110810301020; 81 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Penerapan *good corporate governance* menjadi sangat penting karena semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal tersebut juga menimbulkan tanda tanya apakah penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan telah dilakukan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam sektor perbankan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan CFROA (*Cash Flow Return On Assets*), sedangkan indikator *good corporate governance* dalam penelitian ini ditentukan oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam periode 2012-2013. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan SPSS, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; Komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; sedangkan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Simpulan dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA), sedangkan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA). Saran dalam penelitian ini adalah dewan direksi dalam suatu perusahaan diharapkan dapat selalu memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menghindari dan mengurangi perilaku manajemen yang *opportunistic* dengan melakukan manajemen laba. Dewan direksi juga diharapkan selalu memberikan keputusan dan kebijakan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

SUMMARY

The Influence of Good Corporate Governance on Corporate Financial Performance (Empirical Study on Banking Companies Listed in Indonesia Stock Exchange); Rika Novita Sari; 110810301020; 81 pages; Accounting Department, the Faculty of Economy, Jember University.

Corporate governance is one key element in improving economic efficiency, which includes a series of relationships between corporate management, board of directors, shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure that facilitates the determination of the objectives of a company, and as a means to determine the performance monitoring techniques. Implementation of good corporate governance is very important because the vigorous publicity about fraud (fraud) conducted by the executive management that may affect the financial performance of a company. It also raises a question mark whether the implementation of good corporate governance in a company has done well by the rules that have been set.

This research aimed to examine the effect of corporate governance on financial performance in the banking sector. Financial performance in this research was measured by using CFROA (Cash Flow Return On Assets), while the indicator of good corporate governance in this research are determined by variable managerial ownership, institutional ownership, independent board, audit committee and board of directors.

The population in this research are all banking companies listed on the Stock Exchange (the Indonesia Stock Exchange) in the period 2012-2013. Sampling using purposive sampling and sample in this research amounted to 22 banks. The method used in this research is the method of documentation. Data analysis techniques used in this research is quantitative descriptive analysis using SPSS, classic assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing.

The results of this research indicate that managerial ownership, institutional ownership, and independent board significant negative effect on the financial performance; The audit committee is not a significant positive effect on financial performance; while the board of directors significant positive effect on financial performance.

The conclusions of this research is managerial ownership, institutional ownership, independent board and audit committee has no effect on the financial performance (CFROA), while the board of directors affect the financial performance (CFROA). Suggestions in this research is the board of directors in a company is expected to always provide oversight of performance management to avoid and reduce opportunistic behavior management by performing earnings management. The board of directors is also expected to always give the right decisions and policies that can enhance the company's financial performance.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Sudarno M.Si, Ak selaku dosen pembimbing I dan ibu Novi Wulandari W. SE., M.Acc & Fin. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Yosefa sayekti selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
3. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang pernah mengajar saya dan guru-guru mulai dari TK sampai SMA yang telah memberi ilmu yang begitu bermanfaat.
4. Ibunda tercinta Kasiyem dan Ayahanda terkasih Moch. Salim yang telah memberikan dukungan, semangat, nasihat, dan doa tulus demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Keluarga besar Mbak Titin, Mas Angga, Mas Joko, Mbak Rani, Aradea, Sasa, Dzaky, Nazwa dan saudara lainnya yang belum disebut yang telah memberikan dukungan dan doanya.
6. Sahabat-sahabatku Virda, Winda, Tyara, Sella, Febri, Winda Artha, Mbak Fia, Mbak iik, Firma, Jessica, Indri, Kak Wulan, Ucil, Mbak Hanif, dan sahabat lainnya yang belum disebut yang telah memberi dukungan, semangat, masukan, informasi, dan pinjaman buku demi kelancaran skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan akuntansi 2011 yang selalu membantu saya selama masa perkuliahan dan telah bersedia hadir serta meluangkan waktunya dalam acara seminar proposal saya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.2 Tujuan Penelitian	6
1.3 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	8

2.1.2	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	10
2.1.3	Kepemilikan Manajerial	23
2.1.4	Kepemilikan Institusional	24
2.1.5	Dewan Komisaris Independen	25
2.1.6	Komite Audit	27
2.1.7	Dewan Direksi	28
2.1.8	Pengertian, Pengelompokan, dan Kegiatan Bank	29
2.1.9	Kinerja Keuangan Perbankan	32
2.2	Penelitian Terdahulu	36
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	39
2.4	Perumusan Hipotesis	40
BAB III. METODE PENELITIAN		46
3.1	Jenis dan Sumber Data	46
3.2	Populasi dan Sampel	46
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	47
3.4	Metode Analisis Data	49
3.4.1	Statistik Deskriptif	50
3.4.2	Analisis Regresi Linier Berganda	50
3.4.3	Uji Asumsi Klasik	51
3.4.4	Pengujian Hipotesis	54
3.5	Kerangka Pemecahan Masalah	56
BAB IV PEMBAHASAN		57
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	57
4.1.1	Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI)	57
4.1.2	Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.2	Analisis Data	60
4.2.1	Statistik Deskriptif	60
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	62
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda	67
4.2.4	Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)	68
4.2.5	Uji F	69

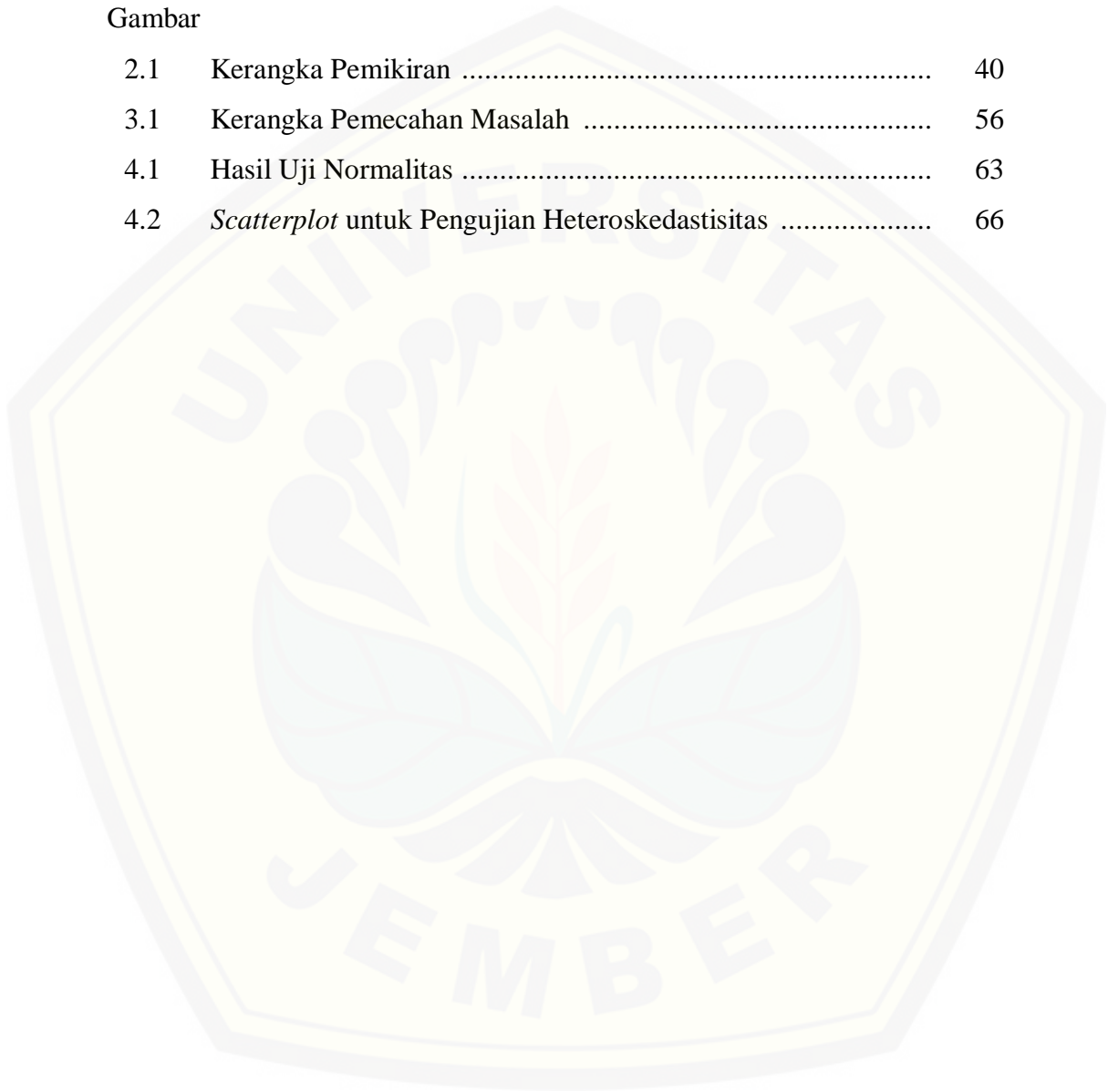
4.2.6 Uji Hipotesis (Uji t)	69
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial (X_1) terhadap Kinerja Keuangan (Y)	72
4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Instiusional (X_2) terhadap Kinerja Keuangan (Y)	72
4.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen (X_3) terhadap Kinerja Keuangan (Y)	73
4.3.4 Pengaruh Komite Audit (X_4) terhadap Kinerja Keuangan (Y)	74
4.3.5 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi (X_5) terhadap Kinerja Keuangan (Y)	75
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Keterbatasan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
2.1 Penelitian Terdahulu	36
4.1 Rincian Pemilihan Sampel Penelitian	58
4.2 Daftar Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI yang Menjadi Sampel Penelitian	59
4.3 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	61
4.4 Hasil Uji Normalitas Data	64
4.5 <i>Collinearity Statistic</i>	64
4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1 Kerangka Pemikiran	40
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	56
4.1 Hasil Uji Normalitas	63
4.2 <i>Scatterplot</i> untuk Pengujian Heteroskedastisitas	66



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
1. Rekapitulasi Perhitungan Kepemilikan Manajerial dan Institusional Tahun 2012-2013	84
2. Rekapitulasi Perhitungan Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Kinerja Keuangan (CFROA) Tahun 2012-2013	87
3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya perusahaan adalah suatu badan usaha yang diatur dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan ketrampilan tertentu agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Beberapa tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba maksimal dari hasil operasi, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan menciptakan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pertumbuhan dan persaingan dunia bisnis sekarang ini memaksa setiap perusahaan untuk menentukan strategi-strategi yang tepat dalam mengelola perusahaannya. Maka perusahaan memerlukan informasi yang tepat untukantisipasi tersebut, terutama informasi yang bersifat jangka panjang.

Pada perusahaan besar dengan tingkat transaksi yang kompleks para pemilik perusahaan akan kesulitan untuk mengambil keputusan di setiap divisi perusahaan karena tidak semua orang memiliki keahlian dalam berbagai bidang organisasi yang kompleks tersebut. Untuk itu mereka mendelegasikan wewenang dan pengambilan keputusan kepada para manajer pada divisinya masing-masing. Dengan didelegasikan para manajer tersebut, maka keputusan tidak lagi dilakukan oleh direktur utama atau pemilik perusahaan tersebut melainkan para manajer dengan pemberian wewenang akan divisi yang dibawahinya.

Pendelegasian tersebut disebut dengan teori keagenan (*agency theory*), dimana hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling 1976 dalam Triwinasis 2013). Dalam teori keagenan (*agency theory*), manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola,

manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal semacam itu disebut dengan masalah agensi (*agency problem*). Dimana masing-masing pihak yaitu manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (prinsipal) mempunyai kepentingannya masing-masing yaitu mensejahterahkan dirinya sendiri.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk, 2004 dalam Triwinasis 2013). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas laba dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang berlandaskan peraturan undang-undang dan norma yang berlaku. Laba merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Baik kreditur ataupun investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earning power*, dan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang.

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung

jawabkan diantara elemen dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan. Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang meyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling 1976 dalam Triwinasis 2013), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kepemilikan manajerial ini sesuai dengan prinsip GCG yaitu transparansi dimana terdapat keterbukaan dalam memberikan informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional (Moh'd dkk dalam Hutapea 2013) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Kepemilikan institusional sesuai dengan prinsip GCG yaitu transparansi dimana terdapat keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Beasley (1996) dalam Hutapea (2013) menemukan bahwa hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan sesuai dengan prinsip GCG yaitu independensi karena dalam menjalankan tugasnya dan mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dan kepentingan pihak manapun. Keempat, komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal ini memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Komite audit merupakan salah satu cerminan prinsip GCG yaitu

independensi dimana komite audit ini akan memastikan apakah perusahaan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada laporan keuangan perusahaan dan dalam menjalankan tugasnya komite audit harus obyektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengambil keputusan. Begitu juga dengan dewan direksi yang akan menentukan kebijakan apa yang diambil untuk jangka pendek dan jangka panjang demi kelangsungan perusahaan tersebut. Dimana dewan direksi juga mencerminkan prinsip GCG yaitu akuntabilitas dimana dewan direksi merupakan organ dalam perusahaan yang menentukan visi dan misi perusahaan kedepannya dan menentukan kebijakan apa yang akan diambil untuk kelangsungan perusahaan kedepannya yang lebih baik.

Penerapan *good corporate governance* juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional dan menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Sejak terjadinya krisis keuangan pada dunia perbankan tersebut kepercayaan nasabah akan dunia perbankan semakin menurun sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum dan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian kesehatan bagi bank umum. Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut membuat kemajuan di dunia perbankan berkembang sangat pesat baik dalam jumlah aset maupun jenis produk yang ditawarkan. Sebagai respon pentingnya GCG dalam dunia perbankan, KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) menerbitkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia tahun 2012 sebagai pengganti Pedoman GCG Perbankan Indonesia tahun 2004 perihal sistem penilaian kesehatan bagi bank umum. Hal tersebut dilakukan karena terdapat perubahan kompleksitas usaha terutama pada produk dan jasa yang beragam sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan

sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan. Pendekatan tersebut memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 2004), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja keuangan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono 2004 dalam Triwinasis 2013).

Cash flow return on assets (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett dkk 2006:21). Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari prose penyusunannya. Kebijakan dan keputusan

yang diambil dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja keuangan. Menurut Hastuti (2005:4) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapatkan labayang sesuai dengan motivasinya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen (Boediono, 2005:6).

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba menguji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan pada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI).

1.1 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
5. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di telah diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan tentang *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi serta bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan investasi kepada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik.

3. Bagi peneliti/pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Brigham dan Houston, 2006). Menurut Darmawati (2004), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manajer*). Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah karena terjadi perbedaan kepentingan antara investor dan manajer. Hal tersebut terjadi karena para pemilik modal atau investor menginginkan kekayaan yang sebesar-besarnya, disamping itu para manajer juga ingin meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Darwis (2009) dalam Hutapea (2013) Pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan *return* dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan kompensasinya.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) perusahaan. Satu atau lebih *principal* memberi wewenang dan otoritas kepada *agent* untuk melakukan kepentingan (*principal*). Dalam suatu korporasi, yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau yang sering disebut dengan CEO.

Agency theory muncul berdasarkan adanya fenomena pemisahan antara pemilik perusahaan (pemegang saham/*owner*) dengan para manajer yang mengelola perusahaan. Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa para manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik perusahaan,

melainkan sering kali terjadi bahwa para pengelola perusahaan (direksi dan manajer) bertindak mengejar kepentingan mereka sendiri (Oktapiyani, 2009).

Informasi laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi yang erat kaitannya dengan *teori agency* (Kim dan Verrechia, 1994) dalam (Sabrina, 2010). Sehingga dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Bila keputusan manajemen merugikan bagi pemilik perusahaan maka akan timbul masalah keagenan (Permanasari, 2010).

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan di tahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan Meckling (1976) pada tulisan yang berjudul “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure”. Konsep-konsep teori keagenan dalam Jensen dan Meckling (1976) di latarbelakangi oleh berbagai teori sebelumnya seperti teori konsep biaya transaksi (Coase, 1937), teori property right (Berle dan Means, 1932), dan filsafat utilitarisme (Ross, 1973). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memecahkan memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan).

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporat egovernance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Oktapiyani, 2009). Sehubungan dengan teori keagenan tersebut, maka pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja manajemen adalah pemilik (*shareholders*). Sehingga dibentuklah dewan komisaris yang ditujukan untuk kepentingan pemilik sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan *good corporate governance* yang harus dipublikasikan untuk semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dengan mempublikasikan *good corporate*

governance diharapkan pemilik modal dapat memantau langsung kinerja perusahaan. Berbagai pemikiran mengenai *good corporate governance* berkembang bertumpu pada *agency theory*, di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Apriyanti, 2006).

2.1.2 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Sam'ani, 2008). Sedangkan Isgiyarta dan Triatiarini (2005) dalam Permanasari (2010) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Terdapat beberapa pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (OECD dalam Jati, 2009)
2. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (IICG dalam Suprayitno, 2004)
3. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara

unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. Corporate governance adalah suatu konsep yang luas. (Sjahdeini, 1999 dalam Faisal, 2005)

4. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum).

Berdasarkan beberapa pengertian yang diuraikan diatas mengenai *good corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur atau sistem pengelolaan dalam suatu perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

2.1.2.1 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam praktik *good corporate governance* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan corporate governance juga akan berbeda (Suprayitno, 2004:18). Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan

(Darmawati, 2006). Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip mengenai *good corporate governance* memiliki banyak versi, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan yaitu terdiri dari lima elemen utama transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

“Pertama transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (2004) yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) memaparkan mengenai arti dari kelima prinsip tersebut, yaitu:

“Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank

(*accountability*), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)”.

Pedoman tersebut merinci konsepsi dari kelima prinsip GCG sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

- a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Menurut Christian sam'ani (2008), prinsip-prinsip GCG memegang peranan penting, antara lain:

- 1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya;

2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan;
3. Perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

2.1.2.2 Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perbankan

Secara sepintas penerapan GCG di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan pada lembaga keuangan non bank. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal konsep teori keagenan (*agency theory*) yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan.

Levine sebagaimana dikutip oleh Supriyatno (2006) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu:

1. Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan

Informasi yang asimetri pada industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Asimetri ini terjadi diantara deposan, manajer bank, pengurus bank, debitor, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi asimetri antara pihak luar bank dan pihak dalam bank, maka akan semakin sulit bagi pihak luar untuk memonitor kinerja *governance* bank. Hal ini menjadi semakin sulit karena deposan dan debitor yang sangat banyak jumlahnya dan tersebar (*diffuse*). Bila jumlah pemegang saham juga banyak dan tersebar, maka kompleksitasnya akan semakin bertambah. Bila terdapat pemegang saham pengendali yang

dominan, pengendalian manajemen akan lebih mudah, akan tetapi juga terdapat bahaya adanya *misconduct*, *fraud* atau penyalahgunaan bank dan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok usahanya. Informasi keuangan yang asimetri ini adalah sumber risiko yang tinggi, baik risiko kredit, risiko operasional maupun risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama terjadinya kejahatan perbankan.

2. Peran Regulasi dalam *Corporate Governance* Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Aturan *corporate governance* dalam industri umumnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak mencampuri urusan proses *governance* perusahaan tersebut. Dalam industri perbankan regulasi yang ada mempengaruhi proses *governance* bank secara langsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai ancaman sanksi hukum.

Menurut Darmawati (2006), penerapan GCG perbankan dianggap unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi liabilitias adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya *mismatch* antara aktiva dan pasiva. Terjadinya *mismatch* dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu meminimkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya moral *hazard*. Bagaimanapun, GCG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen.

Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh

jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu:
 - a. Penetapan visi, misi dan *corporate values*
 - b. Penyusunan *corporate governance structure*
 - c. Pembentukan *corporate culture*
 - d. Penetapan sarana *public disclosures*
 - e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG
2. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.
3. *Corporate governance structure* dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.
 - b. *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
 - c. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
 - d. Organisasi yang di dalamnya tercermin adanya *risk management, internal control* dan *compliance*.
 - e. Kebijakan *risk management, audit* dan *compliance*.
 - f. *Human resource policy* yang jelas dan transparan.
 - g. *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.

4. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guiding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. *Corporate culture* perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.
5. Pembentukan pola dan sasaran *disclosure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholders*. Sarana *disclosure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.

2.1.2.3 Manfaat Good Corporate Governance

Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar (Arafat, 2008 dalam Permanasari, 2010) yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Sedangkan menurut Surya dan Yustiavandana (2007) dalam Oktapiyani (2009) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dinyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Oktapiyani, 2009).

2.1.2.4 Faktor-faktor *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, yakni faktor eksternal dan internal.

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luarperusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *cleangovernance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam *brenchmark* (acuan)
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG dimasyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbulpartisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasiserta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilanimplementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat antikorupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaanberoperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasanpeluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan

lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi GCG.

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mencakup penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) dalam Oktapiyani, 2009, terdapat 7 dimensi/ konsep penerapan GCG, yang diambil dari panduan yang telah ditetapkan oleh OECD dan KNKCG. Tujuh dimensi tersebut yaitu:

- a. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan-sistem manajemen yang mendorong anggota perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Tata kelola dewan komisaris-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan komisaris dalam membantu penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

- c. Komite-komite fungsional-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota komite-komite fungsional dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
- d. Dewan direksi-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan direksi dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas- sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan tentang kegiatan perusahaan.
- f. Perlakuan terhadap pemegang saham-sistem manajemen yang menjamin perlakuan yang setara terhadap pemegang saham dan calon pemegang saham.
- g. Peran pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) sistem manajemen yang dapat meningkatkan peran pihak berkepentingan lainnya.

Laporan pelaksanaan GCG disusun selaras dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Peraturan Bapepam dan LK tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan *The ASEAN Corporate Governance Scorecard* serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Berikut adalah pokok-pokok laporan pelaksanaan GCG:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Dewan Komisaris dan Komite – Komite Penunjangnya
- c. Direksi dan Komite – Komite Eksekutif di Bawah Direksi
- d. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit Eksternal, Fungsi Sekretaris Perusahaan, dan Fungsi *Investor Relations*
- e. Akses Informasi dan Data Perusahaan Kepada Publik
- f. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal
- g. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
- h. Rencana Strategis Perseroan

- i. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya
- j. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
- k. Opsi Saham
- l. Penyimpangan Internal
- m. Permasalahan Hukum
- n. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi
- o. Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Shares Buy Back*)
- p. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial
- q. Kode Etik
- r. Budaya Perusahaan
- s. *Whistleblowing System*
- t. Lain-Lain
- u. *Self Assessment* Pelaksanaan GCG

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lima indikator GCG yang akan dijadikan sebagai variabel bebas dan akan menguji apakah kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan perusahaan. kelima variabel tersebut adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran dewan direksi. Alasan peneliti memilih kelima variabel tersebut karena kepemilikan manajerial dan institusional berkaitan erat dengan teori agensi dimana sistem GCG muncul untuk mengurangi masalah agensi yaitu perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. semakin tingginya kepemilikan manajer ataupun kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri didasarkan atas pengelolaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit akan menambah pengawasan terhadap manajer agar tidak melakukan penyimpangan ataupun *earning management* sehingga hal tersebut juga akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. begitu juga dewan direksi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan sehingga jumlah dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan secara otomatis akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (sam'ani, 2008). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda antara lain:

1. Pihak yang mewakili pemegang saham institusional.
2. Tenaga-tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pihak yang duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.

Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan.

Menurut Melinda (2008) dalam Permanasari (2010), kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal.

Jensen dan meckling (1976) menyatakan bahwa masalah keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Kepemilikan manajerial harus dapat disesuaikan dengan kepentingan pemegang saham agar dapat meminimumkan biaya keagenan yang muncul dari adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol tersebut. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham termasuk mereka sendiri. Kepemilikan manajer yang tinggi menyebabkan manajer tidak hanya memiliki kontrol manajemen namun juga kontrol voting di dalam perusahaan.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaanafiliasi dan perusahaan asosiasi). Pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebihdibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritasatau diatas 5% (Lestari, 2011).

Kepemilikan institusional, umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Menurut Faizal (2005), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan yang diharapkan jugadapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemenperusahaan tersebut. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi institutional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar.

Menurut Shleifer dan Vishny dalam sam'ani (2008): "Jumlah pemegang saham yang besar (*large shareholders*) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti kepemilikan institusi akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan

berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya”.

Kepemilikan institusional menurut Chen & Steiner (1999) dalam Irmala (2010) akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham institusional akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham. Kepemilikan saham institusional yang terjadi di Indonesia terbagi menjadi kepemilikan institusional eksternal dan kepemilikan institusional internal (Mahadwarta, 2004 dalam Irmala, 2010). Kepemilikan institusional eksternal adalah kepemilikan oleh lembaga investasi seperti dana pensiun, asuransi, reksadana, dan perusahaan investasi lainnya, dan menjadi bagian dari kepemilikan saham oleh publik. Kepemilikan institusional internal adalah kepemilikan saham oleh institusi bisnis seperti perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya terpisah dengan kepemilikan publik.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (*bukan controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;

4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*bukan controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 PencatatanEfek Nomor I-A menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Selain itu OECD (2008) juga mengemukakan bahwa anggota dewan independen (*board independences*) dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengambilan keputusan dewan. Mereka dapat membawa pandangan obyektif untuk evaluasi kinerja dewan dan manajemen. Selain itu, mereka dapat memainkan peran penting di daerah dimana kepentingan manajemen, perusahaan dan pemegang saham dapat terfokus.

Sedangkan menurut Peraturan BI No. 14 tahun 2006 menyatakan bahwa komisaris independen merupakan pihak diluar bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen ini memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen. Komisaris independen juga bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penugasannya. Komisaris independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 2001 dalam Supriyatno 2006) atau dengan kata lain, semakin kompeten komisaris independen maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah

satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Anggota komisaris independen memiliki proporsi 50% dari anggota dewan komisaris utama sesuai dengan PBI/14/2006 mengenai pelaksanaan *corporate governance* pada bank umum.

2.1.6 Komite Audit

Pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Seiring dengan menguatnya tuntutan agar perusahaan lebih transparan dan *reliable* mengenai kinerjanya, peran komite audit menjadi semakin penting. Berikut pengertian komite audit dari beberapa ahli:

Menurut Bapepam No. Kep-29/M/2004 yang dikutip oleh Sekaredi (2011), menjelaskan pengertian komite audit sebagai berikut : “Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Lestari (2011), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut : “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”.

Meskipun pendapat mengenai definisi komite audit menurut beberapa ahli berbeda-beda tetapi memiliki maksud yang sama yaitu komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Antonius (2008) dalam lestari (2011), menjelaskan tujuan dan manfaat utama pembentukan komite audit sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan; dan

3. Memperkuat independensi auditor eksternal dan auditor internal.

2.1.7 Dewan Direksi

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama, yaitu sebagai berikut:

1. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan; serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
2. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
3. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan keinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
4. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
5. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas risalah saham yang dimilikinya (Agoes dan Ardana, 2009 dalam Yulius 2013).

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai *principal* dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu Mizruchi (1983) dalam Darmawati (2003) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat

dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependen*. Maksud dari pandangan *resources dependen* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa dengan semakin besar kebutuhan akan menghubungkan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal yaitu : meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Jensen & Meckling, 1976).

Dalton (1999) dalam Bugshan (2005) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg (1998) dalam Brigham and Houston (2006) menyatakan bahwa ada hubungan yang negative antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Meskipun terdapat pendapat yang berbeda tentang ukuran dewan direksi, namun dewan direksi merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan.

2.1.8 Pengertian, Pengelompokan, dan Kegiatan Bank

2.1.8.1 Pengertian Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.8.2 Pengelompokan Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998, bank dikelompokan atas:

1. Bank Umum

Bank umum atau yang biasa dikenal dengan nama bank komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Selain pengelompokan diatas, jenis-jenis bank juga dapat dibedakan:

1. Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank milik negara (BUMN)
- b. Bank milik pemerintah daerah (BPD)
- c. Bank milik swasta nasional
- d. Bank milik swasta asing
- e. Bank milik swasta campuran (swasta nasional dan swasta asing)

2. Berdasarkan penekanan kegiatannya, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Retail banks (bank retail)
- b. Corporate banks (bank korporasi)
- c. Commercial banks (bank komersial)

3. Berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank sentral
- b. Bank umum
- c. Bank tabungan
- d. Bank pembangunan

2.1.8.3 Kegiatan Bank

Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga intermediasi, kegiatan bank sehari-hari juga tidak lepas dari kegiatan menerima uang dan mengeluarkan uang dalam bentuk kredit. Kegiatan perbankan yang ada di Indonesia, terutama bank umum adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)
 - a. Simpanan tabungan (saving deposit)
 - b. Simpanan giro (demand deposit)
 - c. Simpanan deposito (time deposit)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja
 - c. Kredit perdagangan
 - d. Kredit konsumtif
 - e. Kredit produktif kerja
3. Memberikan jasa perbankan lainnya
 - a. Kliring
 - b. Pengiriman uang (transfer)
 - c. Inkaso
 - d. Letter of credit (L/C)
 - e. Perdagangan surat berharga
 - f. Perdagangan valuta asing
 - g. Perbankan elektronik (ATM)

2.1.8.4 Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari:

1. Dana dari modal sendiri, sering disebut juga dana dari pihak ke I, yaitu dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.

2. Dana pinjaman dari pihak luar, sering disebut dengan dana pihak ke II, yaitu dana yang diperoleh dari pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank.
3. Dana dari masyarakat, sering disebut dengan dana dari pihak ke III, yaitu dana yang diperoleh dari peran bank sebagai wadah perantara keuangan masyarakat. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank seperti giro, deposito dan tabungan.

2.1.9 Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan (*financial health*) perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba. Kinerja keuangan yang maksimal dapat diperoleh dengan adanya fungsi yang benar dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, *corporate governance* berperan penting dalam optimalisasi kinerja keuangan. Menurut Febryani dan Zulfadin (2003) dalam Hutapea (2013), kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimana pun karena kinerja perusahaan adalah cerminan perusahaan dalam mengelola aset dan sumber dayanya. Selain itu, tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai target organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana yang dituangkan dalam anggaran.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi *shareholders* dan perusahaan, termasuk perusahaan di sektor perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Booklet Perbankan Indonesia (2012) yang dikutip oleh Hutapea (2013) dinyatakan bahwa bank memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai:

(1) Penunjang kelancaran sistem pembayaran, (2) Pelaksanaan kebijakan moneter, dan (3) Pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Kinerja bank dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Boediono, 2005).

Penilaian kinerja bank menjadi sangat penting dilakukan karena posisi perbankan yang vital di dalam stabilitas perekonomian nasional. Perbankan memainkan peran penting dalam mobilisasi dana, alokasi kredit, sistem pembayaran, dan implementasi kebijakan moneter (Prasinta, 2012). Selain itu, penilaian kinerja bank juga sangat diperlukan oleh setiap *stakeholders* bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen, prospek usahanya dapat terus berkembang, serta dapat memenuhi *prudential banking regulation* dengan baik, tentu akan mendapat kepercayaan penuh dari publik. Kinerja bank yang baik dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank tersebut atau dapat dikatakan kedua hal itu saling berkaitan. Ukuran untuk melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan telah ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan *corporate governance* di industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan seleksi dalam bentuk uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham pengendali, karena pihak-pihak tersebut mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank (Bank Indonesia, 2011).

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan (Purwantini, 2008 dalam Permanasari, 2010). Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan dan kinerja manajemen bank selama satu periode. Dari laporan ini, akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan perbankan digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak (Kasmir, 2000 dalam Bughsan, 2005). Keadaan yang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh para manajer untuk melakukan tindakan manipulasi data dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk meminimalisasi manipulasi data tersebut, maka cara tepat yang digunakan adalah dengan praktik *corporate governance*.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2011) yang dikutip oleh Sari (2010), menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Data historis laporan keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Tujuan pelaporan adalah memberikan informasi yang berguna dalam keputusan-keputusan investasi dan kredit, menilai arus kas mendatang, dan informasi mengenai sumber daya dalam perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang utama adalah (1) Neraca, (2) Laporan laba rugi, (3) Laporan ekuitas pemilik, dan (4) Laporan arus kas.

Perkembangan kinerja keuangan perbankan dapat diukur dengan menggunakan indikator laporan arus kas (*cash flow*). Laporan arus kas menggambarkan jumlah penerimaan kas dan jumlah pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Aktivitas usaha akan menghasilkan arus kas masuk bersih (bila penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas), serta arus kas keluar bersih (bila penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas). Laporan arus kas

menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki perusahaan selama periode berjalan, serta saldo kas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. Selain itu penelitian ini juga menggunakan indikator total aset bank dimana aset yang berada dalam neraca bank menggambarkan pola pengalokasian dana bank yang mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan hasil penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk. Penggunaan dana bank dilakukan berdasarkan prinsip prioritas. Disamping itu kegiatan pengalokasian dana tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur dan mengawasi bank. Aset perbankan menurut Bank Indonesia terdiri atas kas, giro bank Indonesia, tagihan pada bank lain, giro, *call money*, kredit yang diberikan, surat berharga dan tagihan, penyertaan, cadangan aktiva yang diklasifikasikan, aktiva tetap dan rupa-rupa aktiva.

Cash Flow Return On Assets (CFROA) adalah salah satu alat pengukur kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva (Sam'ani, 2008). Arus kas (*cash flow*) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang (Kieso dan Weygandt, 1995). Cornett (2006) menyatakan bahwa penggunaan CFROA dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan memiliki berbagai keunggulan sebagai berikut: (1) CFROA menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba operasi, (2) CFROA lebih memfokuskan kepada pengukuran kinerja keuangan perusahaan saat ini dan tidak terikat dengan saham, dan (3) Adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* dan berhubungan positif dengan CFROA.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Candra Rifqi Triwinasis (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	1. Variabel dependen: kinerja keuangan (CFROA) 2. Variabel independen: kepemilikan institusional, proporsi dewan komisarisindependen, dan komite audit	1. Kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
2.	Irmala Sari (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan Nasional	1. Variabel dependen: Kinerja Perbankan (ROA) 2. Variabel Independen: pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator, mekanisme pemantauan pengungkapan.	1. Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. 2. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan yang positif namun tidak signifikan. 3. Mekanisme Pemantauan

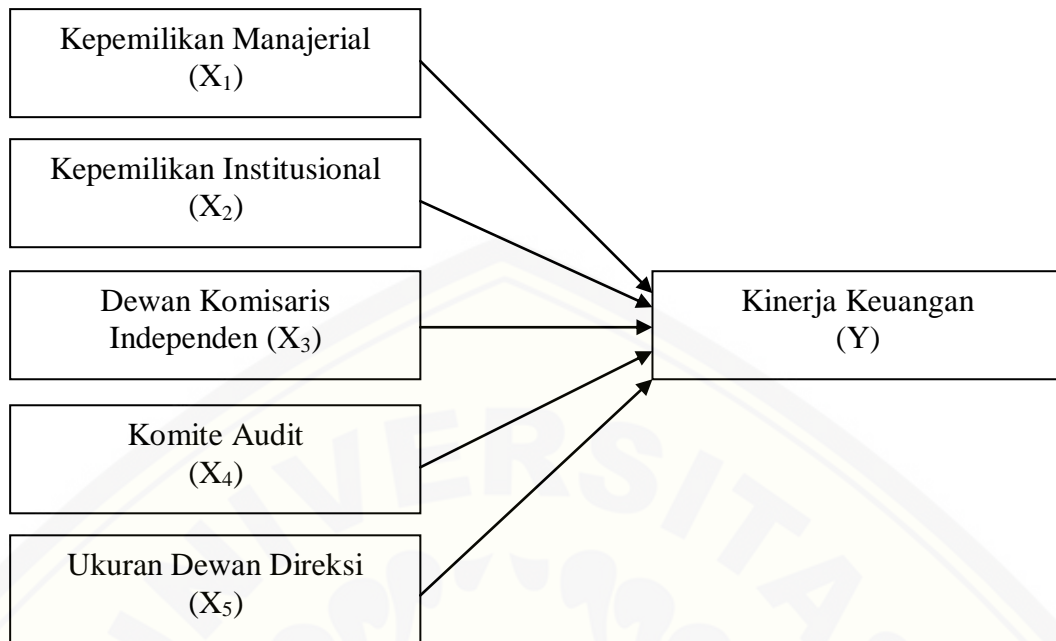
				<p>Regulator melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.</p> <p>4. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal <i>Big 4</i> menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.</p>
3.	Sawitri Sekareidi (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan Perusahaan	<p>1. Variabel dependen: kinerja keuangan perusahaan</p> <p>2. Variabel independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit</p>	<p>1. kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>2. dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan</p> <p>3. dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan</p> <p>4. komite audit berpengaruh</p>

				negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan
4.	Framudyo Jati (2009)	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: kinerja perusahaan (ROA dan ROE) 2. Variabel independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, komite audit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Menggunakan ukuran ROA) Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 2. Menggunakan ukuran ROE semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
5.	Ekowati Dyah Lestari (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: kinerja keuangan 2. Variabel independen: aktivitas dewan komisaris, dewan komisaris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 2. Dewan direksi dan dewan

			independen, dewan direksi, komite audit	komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
6.	Eka Hardikasar i (2011)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Ter hadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006- 2008	1. Variabel dependen: kinerja keuangan (CFROA) 2. Variabel independen: ukur an dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan	1. Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu serta masalah yang dikemukakan sebelumnya pada penelitian ini, maka kerangka pemikiran teoritis yang akan dijadikan dasar sebagai perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang disebut dengan *agency problem*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Untuk mengatasi masalah keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer maka menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Yulius (2013), salah satu cara guna mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. hal itu berarti bahwa kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial juga dapat menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham sehingga manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena

mereka ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Listiyani, 2003 dalam Yulius, 2013).

Level kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan mengurangi masalah keagenan karena dengan peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri seperti dengan melakukan *earning management* yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jati (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi masalah keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. dengan semakin tingginya kepemilikan institusional maka pihak institusi dapat memonitoring penuh setiap kinerja manajer, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang biasa terjadi antara pemegang saham dengan manajer.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Permanasari (2010:6) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis

sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi tersebut akan membuat kinerja manajer dalam mengambil keputusan lebih baik dan tidak mementingkan diri sendiri sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Fama dan Jensen, 1983 dalam Sari, 2010). Barnhart & Rosenstein (1998) dalam Sekaredi (2011) melakukan penelitian mengenai “*Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance*”, yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan demikian Jumlah dewankomisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yangmelakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh komisaris diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku

oportunistik manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan melakukan manajemen laba yang akan berdampak pada laporan keuangan perusahaan sehingga keberadaan dewan komisaris independen sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Hardikasari (2011) mengemukakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit.

Klein (2002) dalam Sam'ani (2008) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Waterhouse (1989) dalam Lestari (2011) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk

sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas *earning management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba.

Triwinasis (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lestari (2011) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan Apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimalisasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Alexander 1998 dalam Lestari, 2011). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Hardikasari (2011) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang

semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Semakin banyak jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik (Oktapiyani, 2009). Dengan semakin banyaknya jumlah dewan direksi maka akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan diperoleh melalui dokumen, literatur, data yang diperoleh dari internet serta data yang diperoleh daripihak ketiga (Ghozali, 2009). Penggunaan data sekunder memberikan jaminan tidak adanya manipulasi data yang dilakukan pihak tertentu sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa laporan keuangan tahunan dan data perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh manajemen dan pihak institusional. Sumber data tersebut diperoleh dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui internet (www.idx.co.id), website perusahaan yang bersangkutan serta sumber-sumber lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil subjek penelitian bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Ghozali, 2009). Tujuan digunakannya metode *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan perbankan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013 hingga penelitian ini selesai dilakukan.

- b. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara konsisten selama 2 tahun berturut-turut.
- c. Data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan tahunan perusahaan antara tahun 2012-2013.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

a. Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan.

b. Variabel Independen

Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran dewan direksi.

3.3.2 Definisi Operasional

3.3.2.1 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan, kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *cash flow return on asset (CFROA)*. *Cash Flow Return On Assets (CFROA)* adalah salah satu alat pengukur kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan (Sam'ani, 2008). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva. Rumus CFROA adalah sebagai berikut (Hardikasari, 2011):

$$\text{CFROA} = \frac{\text{EBIT} + \text{Dep}}{\text{Assets}}$$

Dimana :

CFROA = *Cash Flow Return on Assets*

EBIT = Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Dep = Depresiasi

Assets = Total Aktiva

3.3.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Rasio kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut (Sujono dan Soebiantoro 2007) dalam (Sabrina 2010):

$$= \frac{\sum \text{saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.3.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan saham institusional merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan lain yang berada didalam maupun diluar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri (Susiana & Herawati, 2007 dalam Yulius, 2013). Kepemilikan saham institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insider (Moh'd, 1998 dalam Yulius, 2013), selanjutnya akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan, yang secara otomatis akan menyebabkan peningkatan nilai perusahaan. Secara matematis kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Wahidahwati, 2002):

$$= \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.3.2.4 Dewan Komisaris Independen

dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. rasio dewan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut (Wahidahwati, 2002):

$$= \frac{\sum \text{dewan komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.3.2.5 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya (Wulandari, 2006). Jumlah komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota audit yang ada pada setiap perusahaan dalam penelitian ini.

$$= \sum \text{anggota komite audit}$$

3.3.2.6 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah ukuran (jumlah) dewan direksi pada sebuah perusahaan. Dimana dewan direksi (direktur) merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin sebuah perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat dirumuskan sebagai berikut (Sekaredi, 2011):

$$= \sum \text{jumlah anggota dewan direksi}$$

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengolah data sehingga dapat diketahui

dispersi dan distribusi data. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji asumsi klasik, uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan suatu model regresi yang selanjutnya model regresi tersebut akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Suryoatmono (2004) dalam Sekaredi (2011), statistik deskriptif adalah statistik yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik sebuah kesimpulan mengenai kelompok yang diteliti saja. Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana,

Y	= Kinerja Keuangan
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5	= Koefisien Regresi
X_1	= Kepemilikan Manajerial
X_2	= Kepemilikan Intitusional
X_3	= Dewan Komisaris Independen
X_4	= Komite Audit
X_5	= Ukuran Dewan Direksi
e	= Error

Agar model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini memberikan hasil estimasi yang terbaik, maka model harus memenuhi asumsi regresi linier klasik, yaitu tidak terjadi gejala multikolonieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan berdistribusi normal ataupun mendekati normal.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 4 uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan cara analisis grafik (*scatterplot*) yaitu dengan melihat *normal probabilityplot* yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas yang kedua dalam penelitian ini adalah uji parametrik Kolmogrov Smirnov (K-S). Dalam uji K-S, data residual dikatakan terdistribusi normal jika nilai *Asymp. sig.* lebih dari 0,05 (5%). Sedangkan data residual dikatakan tidak terdistribusi normal jika nilai *Asymp. sig.* kurang dari 0,05 (5%).

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dengan kata lain uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan VIF ≤ 10 , dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas (Sanusi, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Gozhali, 2011:125). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara Uji Glejser yaitu dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi. Menurut Ghozali (2011:125-126) kriteria analisis yang digunakan adalah sebaga berikut:

1. Jika grafik plot menunjukkan suatu pola seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas yaitu titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 (5%) maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual kurang dari 0,05 (5%) maka terjadi hetroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi, maka varians sampel tidak dapat menjelaskan varians populasinya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah tersebut timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observari ke observasi lainnya. Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW). Dimana hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

1. H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)
2. H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4 - du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. Bila nilai DW lebih besar daripada $(4 - dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti autokorelasi negatif. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) serta DW terletak antara $(4 - du)$ dan $(4 - dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan (Ghozali, 2011).

3.4.4 Uji hipotesis

3.4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Jika uji F tidak signifikan maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji persial. Uji dilakukan dengan menggunakan table ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

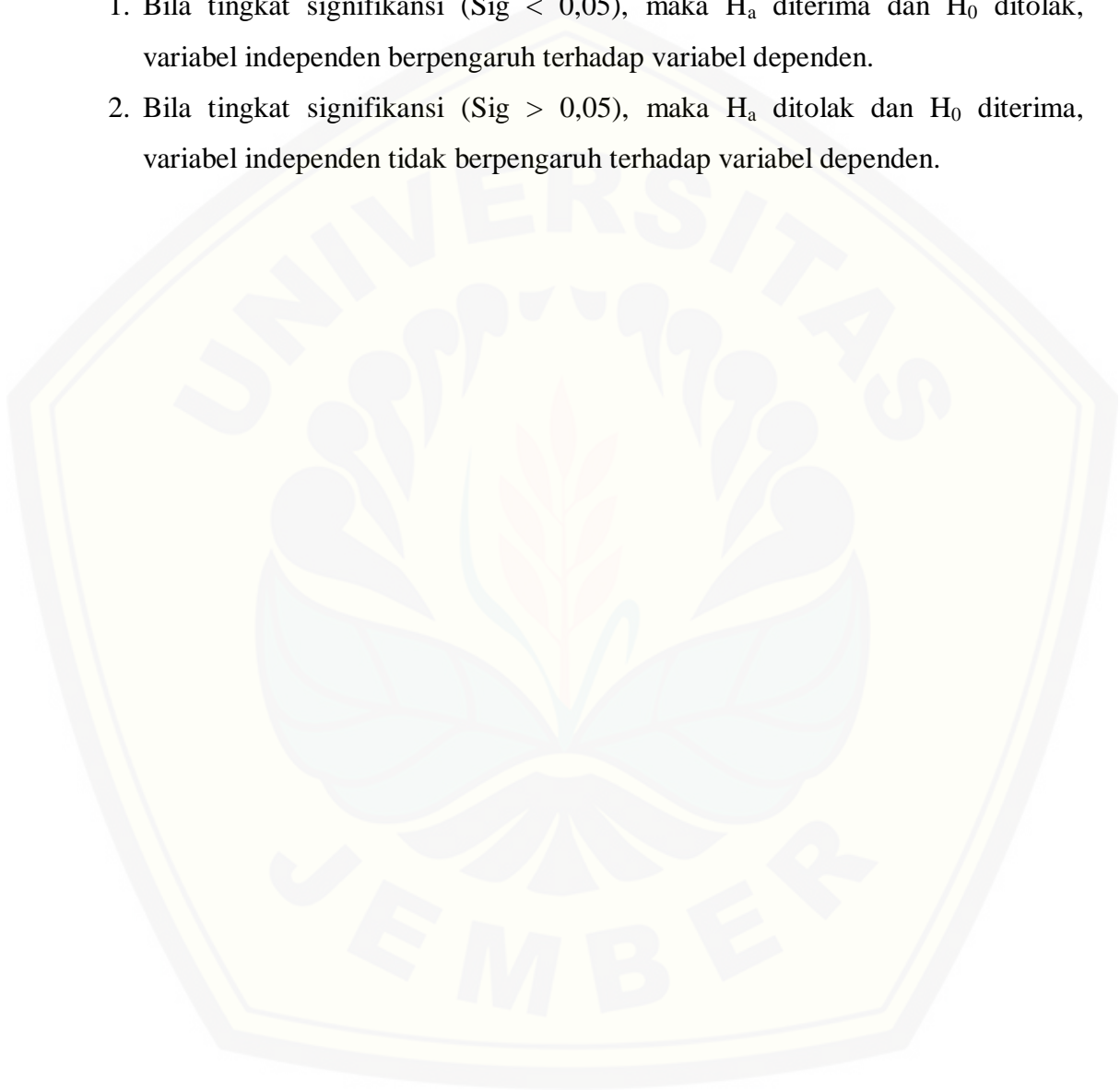
1. Bila nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05 ($\text{Sig} \geq 0,05$), hal tersebut berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen sehingga model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.
2. Bila nilai signifikan kurang dari atau sama dengan 0,05 ($\text{Sig} \leq 0,05$), hal tersebut berarti variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen sehingga model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.

3.4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

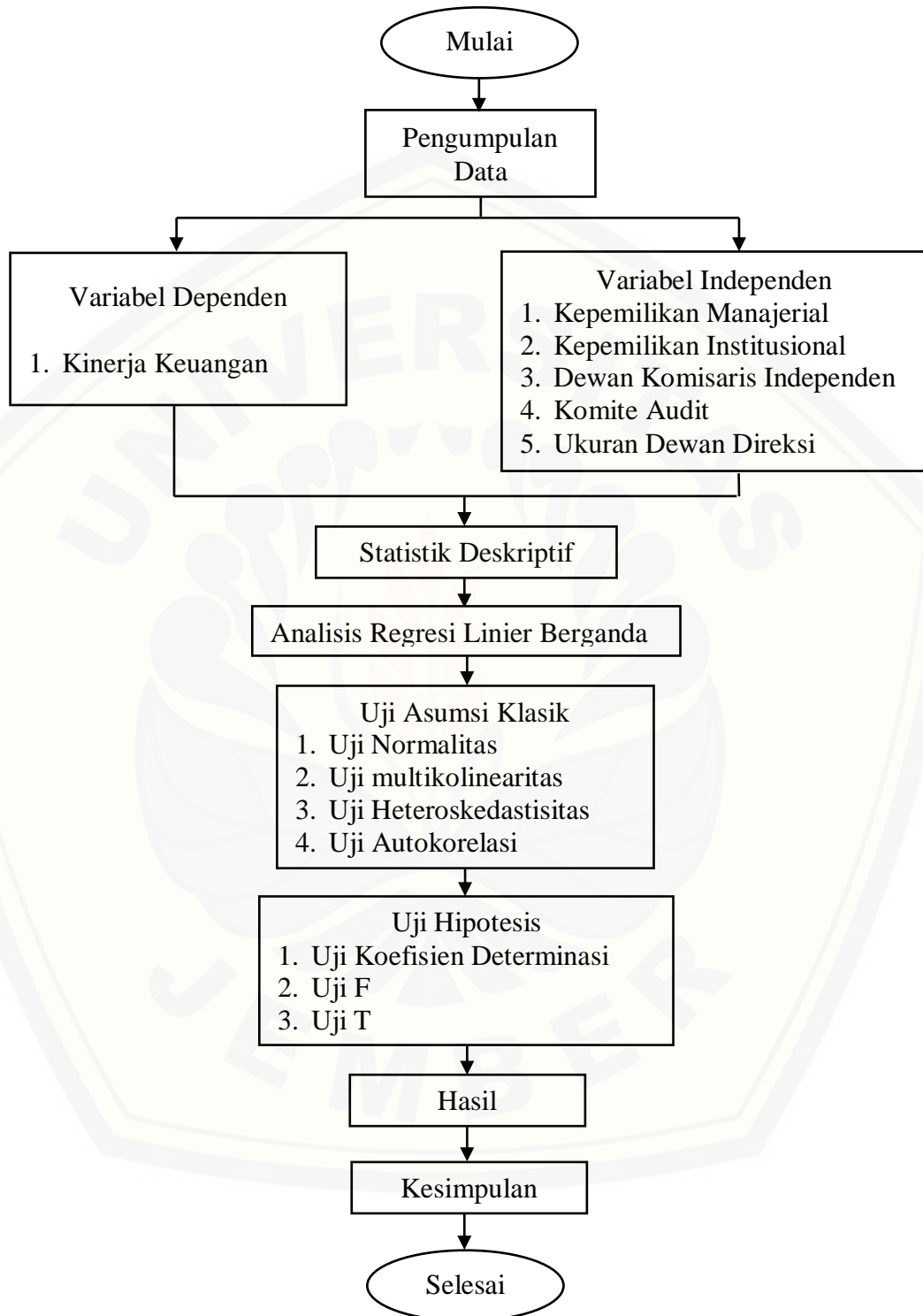
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen apakah benar-benar berpengaruh secara parsial (terpisah) terhadap variabel dependennya. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen (Ghozali, 2011). Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut (Ghozali, 2011)

1. Bila tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



3.5 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1

Kerangka Pemecahan Masalah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (H_1 ditolak). Hal tersebut terjadi karena masih minimnya kepemilikan manajerial dalam penelitian ini yaitu hanya berkisar antara 0,002% - 28,23% sehingga menyebabkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Cornett (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang cenderung rendah tidak akan mampu menjadi mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.
2. Kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (H_2 ditolak). Hal tersebut terjadi karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. Dengan adanya kecenderungan tersebut membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan pemegang saham mayoritas (*institutional ownership*). Pranata (2003) dalam Triwinasis (2013) menyatakan bahwa institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada *current earnings*. Akibatnya manajer terpaksa melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek seperti memanipulasi laba yang berdampak kinerja keuangan.

3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (H_3 ditolak). Hal tersebut terjadi karena pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk penegakan *Good Corporate Governance (GCC)* di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil penelitian dari Boediono & Gideon (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen.
4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (H_4 ditolak). Hal tersebut terjadi karena keberadaan komite audit mungkin hanya ditujukan untuk memenuhi salah satu indikator *Good Corporate Governance* tanpa mempertimbangkan kemampuan, integritas, pendidikan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang audit yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jati (2009) yang menyebutkan bahwa komite audit dalam suatu perusahaan tidak memiliki hubungan dengan kinerja keuangan perusahaan tersebut.
5. Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (H_5 diterima). Hal tersebut terjadi karena Semakin banyak jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik (Oktapiyani, 2009). Dengan semakin banyaknya jumlah dewan direksi maka akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

5.2 Keterbatasan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Terdapat lima prinsip-prinsip *Good corporate governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Penelitian ini tidak mencakup kelima prinsip tersebut. Prinsip yang terwakili dalam penelitian ini yaitu: prinsip transparansi (struktur kepemilikan perusahaan), prinsip

independensi (kehadiran dewan komisaris independen dan komite audit) serta prinsip akuntabilitas (keberadaan dewan direksi)

2. Data penelitian merupakan data kuantitatif yang diangkat dari laporan tahunan dari perusahaan. Sementara inti dari pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* adalah bagaimana pelaksanaannya dilapangan.

Dari hasil penelitian ini kiranya peneliti dapat memberikan saran, diantaranya:

1. Menggunakan secara lengkap prinsip-prinsip *good corporate governance*, dengan lebih mengembangkan indikator-indikator selain yang digunakan dalam penelitian ini yang mewakili setiap prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan lebih mencerminkan pelaksanaan *good corporate governance* yang sebenarnya dalam suatu perusahaan.
2. Menggunakan data kualitatif, bagaimana implementasi *good corporate governance* di lapangan, misalnya bagaimana tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris independen, komite audit serta dewan direksi dalam suatu perusahaan bukan hanya melihat dari jumlah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti. 2006. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Profitabilitas dan Kinerja Pasar*. Skripsi Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Bank Indonesia. 2004. *Peraturan BI no 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bagi Bank Umum*.
- Bank Indonesia. 2006. *Peraturan BI No 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan GCG Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006*.
- Boediono. & Gideon, S. B. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis*.
- Brigham, E. F. & Erhardt, M. C. 2005. *Financial Management Theory and Practice*. 11 th Edition. Ohio : South Western.
- Budiarti, I. 2010. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan*. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 8, No. 2.
- Bugshan, T. 2005. *Corporate Governance, Earning Management and the Information Content of Accounting Earnings, Theoretical Model and Empirical Tests*. A Dissertation. Bond University Queensland. Australia.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. 2006. *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*. <http://papers.ssrn.com/>
- Darmawati, D. dkk. 2004. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.
- Darmawati, D. dkk. 2005. *Hubungan Corporate Governance, Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.8, No.1, Hal.65-81.
- Dewayanto, T. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*. *Jurnal Fokus Ekonomi*. Vol. 5, No. 2.

- Faisal. 2005. *Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 8, No. 2. Hal. 175-190.
- Ghozali, I. 2009. *Ekonometrika. Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2011. *Ekonometrika. Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardikasari, E. 2011. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) 2006-2008*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hutapea, A. J. 2013. *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia 2007-2011)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hastuti, T. D. 2005. *Hubungan antara Good Corporate Governace dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta)*. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. IAI. 2005.
- Jati, F. 2009. *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia*. Artikel. Universitas Gunadarma.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics*. 3. 305-360.
- Kalihatu, T. S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 8, No. 1.
- Kieso, D. and Jerry J. Weygandt. 2007. *Intermediate Accounting. Twelfth Edition*. John Willey and Sons: New York.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Lestari, E. D. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- National Committee on Corporate Governance (NCCG). 2006. *Indonesian Code for Good Corporate Governance*.

- Oktapiyani, D. 2009. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Likuiditas Perbankan Nasional*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Permanasari, I. W. 2010. *Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prasinta, D. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap kinerja Keuangan*. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1, No. 2.
- Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.
- Sabrina, A. I. 2010. *Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004-2007*. Tesis S-2 Magister Manajemen. Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sanusi, A. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, I. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sekaredi, S. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Suprayitno. G. dkk. 2004. *Komitmen Menegakan Good Corporate Governance, The Indonesian Institute of Corporate Governance*. Jakarta: *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*.
- Supriyatno. 2006. *Pengaruh Corporate Governance dan Bentuk Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan Bank di Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Triwinasis. C. R. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Ujiyantho. A. & Pramuka B. A. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.

Wahidahwati. 2002. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency*. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 5, No. 1.

Wulandari, N. 2006. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia*. *Jurnal Fokus Ekonomi*. Vol. 1, No. 2.

Yulius, A. 2013. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan manufaktur di Indonesia*. Skripsi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacan

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Bank](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank). [25 Oktober 2014]

LAMPIRAN 1

REKAPITULASI PERHITUNGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN INSTITUSIONAL TAHUN 2012

No	Perusahaan	jumlah saham manajerial	jumlah saham institusional	jumlah saham beredar	kepemilikan manajerial	kepemilikan institusional
1	AGRO	506.533.381	2.886.690.021	3.618.095.578	14,00	79,78
2	BABP	51.369.938	4.458.679.770	5.486.078.541	0,94	81,27
3	BACA	983.634.709	1.800.000.000	4.550.852.657	21,61	39,55
4	BBCA	64.548.662	11.625.990.000	24.655.010.000	0,26	47,15
5	BBKP	18.819.665	4.818.000.718	7.970.061.291	0,24	60,45
6	BBNI	43.761.936	18.190.195.449	18.648.656.459	0,23	97,54
7	BBNP	37.567.806	376.968.099	416.513.158	9,02	90,51
8	BBRI	94.326.500	10.306.028.938	24.669.162.000	0,38	41,78
9	BBTN	9.945.650	7.027.294.078	10.356.440.500	0,10	67,85
10	BDMN	25.898.822	7.069.517.360	9.584.643.365	0,39	73,76
11	BEKS	3.270.000	9.882.982.616	10.755.117.153	0,03	91,89
12	BJBR	4.032.000	7.272.218.666	9.696.291.166	0,04	75,00
13	BMRI	466.666.666	14.000.000.000	23.333.333.333	2,00	60,00
14	BNII	18.500.000	54.755.477.391	56.281.990.760	0,03	97,29
15	BNLI	26.880.234	8.042.661.744	9.033.646.911	0,30	89,03
16	BSIM	3.554.375	6.843.751.668	10.283.836.238	0,03	66,55
17	BTPN	49.618.500	3.379.879.850	5.840.287.257	0,85	57,87

18	BVIC	882.000.000	3.525.694.369	6.604.344.442	13,35	53,38
19	INPC	203.184.139	4.511.393.449	8.575.076.227	2,37	52,61
20	MAYA	28.972.500	2.488.993.110	3.091.838.400	0,94	80,50
21	MEGA	76.889.432	2.108.167.412	3.645.956.050	4,03	57,82
22	NISP	1.267.223	7.273.245.613	8.548.918.395	0,02	85,08

REKAPITULASI PERHITUNGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN INSTITUSIONAL TAHUN 2013

No	Perusahaan	jumlah saham manajerial	jumlah saham institusional	jumlah saham beredar	kepemilikan manajerial	kepemilikan institusional
1	AGRO	1.044.978.364	5.992.378.973	7.450.781.177	14,03	80,43
2	BABP	67.601.539	4.134.047.770	5.486.078.541	1,23	75,36
3	BACA	1.806.298.497	2.107.635.000	6.397.416.110	28,23	32,95
4	BBCA	63.797.068	11.625.990.000	24.655.010.000	0,26	47,15
5	BBKP	13.795.499	5.331.781.868	8.500.687.441	0,16	62,72
6	BBNI	39.931.446	18.190.195.450	18.648.656.458	0,21	97,54
7	BBNP	37.567.806	577.735.160	676.833.882	5,55	85,36
8	BBRI	94.326.500	10.306.028.938	24.669.162.000	0,38	41,78
9	BBTN	14.054.650	6.895.719.968	10.564.853.500	0,13	65,27
10	BDMN	25.898.822	7.069.517.360	9.584.643.365	0,27	73,76
11	BEKS	197.500	9.882.982.616	10.755.117.153	0,002	91,89

12	BJBR	4.492.500	7.272.218.666	9.696.291.166	0,05	75,00
13	BMRI	466.666.666	14.000.000.000	23.333.333.333	2,00	60,00
14	BNII	18.500.000	54.755.477.391	56.281.990.760	0,03	97,29
15	BNLI	26.880.234	9.541.466.498	10.649.247.933	0,25	89,60
16	BSIM	3.954.375	7.861.971.522	13.116.881.498	0,03	59,94
17	BTPN	49.618.500	3.379.879.850	5.840.287.257	0,85	57,87
18	BVIC	882.000.000	3.525.694.369	6.604.344.442	13,35	53,38
19	INPC	203.184.139	4.511.393.449	8.575.076.227	2,37	52,61
20	MAYA	28.972.500	2.488.993.110	3.478.318.200	0,83	71,56
21	MEGA	146.858.773	4.026.599.755	6.963.775.206	2,11	57,82
22	NISP	1.642.009	9.760.695.612	11.472.648.486	0,01	85,08

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI PERHITUNGAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DIREKSI DAN KINERJA KEUANGAN (CFROA)

TAHUN 2012

No	Perusahaan	Proporsi Dewan Komisaris Independen			Jumlah Komite Audit	Jumlah Direksi	Kinerja Keuangan			
		Komisaris Independen	Jumlah Komisaris	Proporsi Komisaris			EBIT	Depresiasi	Total Aset	CFROA
1	AGRO	2,00	4,00	50,00	3	5	51.471.054	44.501.864	4.040.140.235	2,375
2	BABP	3,00	4,00	75,00	4	5	6.010.082	138.715.285	7.433.803.459	1,947
3	BACA	2,00	3,00	66,67	3	4	62.561	51.152	5.666.177	2,007
4	BBCA	3,00	5,00	60,00	3	10	14.686.046	4.213.740	442.994.197	4,266
5	BBKP	3,00	5,00	60,00	4	7	1.059.370	470.083	65.689.830	2,328
6	BBNI	4,00	7,00	57,14	4	10	8.889.562	5.096.158	333.303.506	4,196
7	BBNP	2,00	4,00	50,00	3	5	115.153.801	44.821.460	8.212.208.488	1,948
8	BBRI	4,00	8,00	50,00	8	11	23.859.572	4.414.441	551.336.790	5,128
9	BBTN	3,00	6,00	50,00	3	7	1.863.202	1.043.728	111.748.593	2,601
10	BDMN	4,00	8,00	50,00	6	11	5.486.679	1.912.412	155.791.308	4,749
11	BEKS	3,00	4,00	75,00	3	5	68.220	118.719	7.682.938	2,433
12	BJBR	4,00	6,00	66,67	5	4	1.194.190	555.541	67.708.134	2,584
13	BMRI	4,00	7,00	57,14	6	11	20.504.268	4.938.075	635.618.708	4,003
14	BNII	4,00	7,00	57,14	5	9	1.695.869	912.218	115.772.908	2,253
15	BNLI	5,00	9,00	55,56	4	9	1.888.081	575.466	131.798.595	1,869

16	BSIM	2,00	3,00	66,67	5	7	285.479	140.261	15.151.892	2,810
17	BTPN	3,00	6,00	50,00	5	10	2.485.314	386.496	59.090.132	4,860
18	BVIC	3,00	4,00	75,00	3	5	252.594.217	58.890.239	14.352.840.454	2,170
19	INPC	3,00	5,00	60,00	5	6	49.697	28.796	20.558.770	0,382
20	MAYA	3,00	6,00	50,00	3	6	351.140.867	281.404.156	17.166.551.873	3,685
21	MEGA	2,00	3,00	66,67	3	9	1.566.014	1.019.576	65.219.108	3,964
22	NISP	4,00	8,00	50,00	4	9	1.222.241	562.688	79.141.737	2,255

**REKAPITULASI PERHITUNGAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DIREKSI DAN KINERJA KEUANGAN (CFROA)
TAHUN 2013**

No	Perusahaan	Proporsi Dewan Komisaris Independen			Jumlah Komite Audit	Jumlah Direksi	Kinerja Keuangan			
		Komisaris Independen	Jumlah Komisaris	Proporsi Komisaris			EBIT	Depresiasi	Total Aset	CFROA
1	AGRO	2,00	4,00	50,00	3	5	71.589.231	48.675.506	5.124.070.015	2,347
2	BABP	3,00	4,00	75,00	4	5	(66.541.664)	149.363.573	8.165.865.135	1,014
3	BACA	2,00	3,00	66,67	3	4	93.343	61.063	7.139.276	2,163
4	BBCA	3,00	5,00	60,00	3	10	17.815.606	4.962.996	496.304.573	4,590
5	BBKP	3,00	5,00	60,00	4	7	1.193.605	526.330	69.457.663	2,476
6	BBNI	4,00	7,00	57,14	4	10	11.278.165	5.667.667	386.654.815	4,383

7	BBNP	2,00	4,00	50,00	3	5	141.923.108	54.079.862	9.985.735.803	1,963
8	BBRI	4,00	8,00	50,00	8	11	23.859.572	4.414.441	551.336.790	5,128
9	BBTN	3,00	6,00	50,00	3	7	2.140.771	1.311.027	131.169.730	2,632
10	BDMN	4,00	8,00	50,00	6	11	5.486.679	1.912.412	155.791.308	4,749
11	BEKS	2,00	3,00	66,67	4	6	102.429	152.070	9.003.124	2,827
12	BJBR	4,00	5,00	80,00	5	4	1.752.874	655.626	70.958.233	3,394
13	BMRI	4,00	8,00	50,00	6	11	20.504.268	4.938.075	635.618.708	4,003
14	BNII	3,00	6,00	50,00	4	8	1.695.869	912.218	115.772.908	2,253
15	BNLI	4,00	8,00	50,00	4	9	2.301.503	578.850	165.833.922	1,737
16	BSIM	2,00	3,00	66,67	5	6	286.100	195.068	17.447.455	2,758
17	BTPN	3,00	6,00	50,00	5	10	2.485.314	386.496	59.090.132	4,860
18	BVIC	3,00	4,00	75,00	3	6	330.171.255	70.888.695	19.171.351.935	2,092
19	INPC	3,00	5,00	60,00	9	6	293.613	67.315	21.188.582	1,703
20	MAYA	3,00	6,00	50,00	3	6	509.628.250	322.755.658	24.015.571.540	3,466
21	MEGA	2,00	3,00	66,67	3	9	632.550	1.200.249	66.475.698	2,757
22	NISP	4,00	8,00	50,00	4	11	1.529.716	692.645	97.524.537	2,279

LAMPIRAN 3

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,700 ^a	,491	,424	,895713

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,070 ^a

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,360	5	5,872	7,319	,000 ^a
	Residual	30,487	38	,802		
	Total	59,847	43			

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,905	1,973		,966	,340
	X1	-,012	,030	-,065	-,407	,686
	X2	-,014	,010	-,218	-1,513	,139
	X3	-,003	,018	-,025	-,175	,862
	X4	,006	,110	,008	,056	,956
	X5	,300	,080	,617	3,727	,001

a. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,528	1,896
	X2	,647	1,545
	X3	,666	1,501
	X4	,697	1,434
	X5	,490	2,042

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model		X5	X2	X4	X3	X1	
1	Correlations	X5	1,000	,283	-,142	,526	,467
		X2	,283	1,000	,364	,291	,529
		X4	-,142	,364	1,000	,077	,333
		X3	,526	,291	,077	1,000	,213
		X1	,467	,529	,333	,213	1,000
1	Covariances	X5	,006	,000	-,001	,001	,001
		X2	,000	,000	,000	,000	,000
		X4	-,001	,000	,012	,000	,001
		X3	,001	,000	,000	,000	,000
		X1	,001	,000	,001	,000	,001

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5
1	1	4,963	1,000	,000	,004	,001	,001	,003	,002
	2	,830	2,445	,000	,458	,001	,000	,002	,002
	3	,111	6,684	,001	,039	,141	,008	,269	,043
	4	,060	9,091	,000	,068	,005	,042	,280	,448
	5	,032	12,367	,004	,146	,414	,214	,337	,045
	6	,004	37,397	,995	,285	,439	,735	,109	,460

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1,79803	4,48714	2,96338	,826310	44
Residual	-2,374794	1,596221	,000000	,842028	44
Std. Predicted Value	-1,410	1,844	,000	1,000	44
Std. Residual	-2,651	1,782	,000	,940	44

a. Dependent Variable: Y

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	44	,002	28,235	3,262	6,295
X2	44	32,945	97,542	69,569	17,741
X3	44	50,000	80,000	58,692	9,348
X4	44	3	9	4,273	1,484
X5	44	4	11	7,545	2,425
Y	44	,382	5,128	2,963	1,180
Valid N (listwise)	44				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	X3
N		44	44	44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,262	69,569	58,692
	Std. Deviation	6,295	17,741	9,348
Most Extreme Differences	Absolute	,352	,105	,256
	Positive	,352	,105	,256
	Negative	-,302	-,082	-,176
Kolmogorov-Smirnov Z		1,234	,699	1,295
Asymp. Sig. (2-tailed)		,095	,712	,070

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

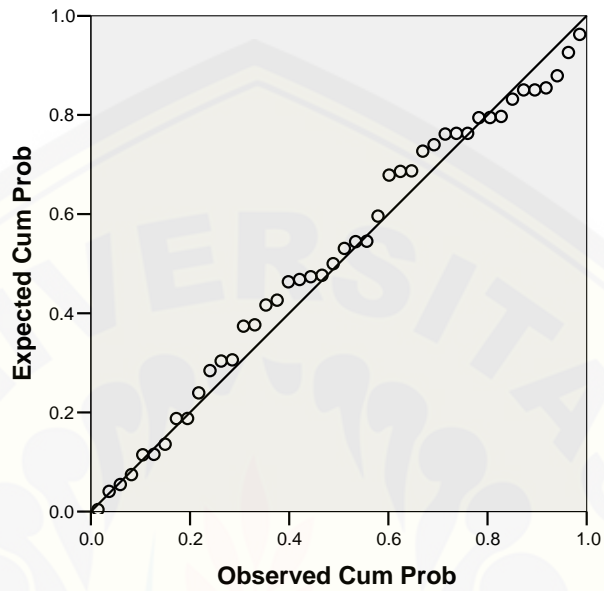
		X4	X5	Y
N		44	44	44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4,273	7,545	2,963
	Std. Deviation	1,484	2,425	1,180
Most Extreme Differences	Absolute	,232	,170	,182
	Positive	,232	,170	,182
	Negative	-,196	-,157	-,097
Kolmogorov-Smirnov Z		1,239	1,127	1,210
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093	,158	,107

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Scatterplot

Dependent Variable: Y

